

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BAPPEDA KOTA BOGOR *Tahun 2018*



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA BOGOR**

Jl. Kapten Muslihat No. 21 Bogor  
Tlp. 0251 - 8338052  
BOGOR -16121

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Khadirat Tuhan YME, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor Tahun 2018. Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan apaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2018 yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor Tahun 2014 – 2019. Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Laporan Kinerja Nomor 4614), dengan Negara Republik Indonesia berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami

telah berupaya secara optimal, namun kami



Renja Bappeda Kota Bogor

Tahun 2018

menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masuk dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhiri kata,

semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor.

**Bogor, 2019**

**KEPALA**

**Ir. ERNA HERNAWATI, MM., MBA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621208 199203 2 004



## IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada prinsipnya merupakan alat pertanggungjawaban dari unit organisasi yang lebih rendah kepada unit organisasi yang lebih tinggi yang menonjolkan akuntabilitas manajerialnya. LKIP menjadialatukurbagikeberhasilanataukegagalan SKPD dalam mencapaisasaranstrategis sesuaidenganRenstra-SKPD danmemberikanumpanbalikuntukmeningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Bappeda Kota Bogor. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam siklus perencanaan pembangunan karena informasi hasil evaluasi kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan akuntabilitas kinerja merupakan titik kritis yang penting dalam melakukan perbaikan dalam siklus perencanaan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan SKPD yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam sebuah mekanisme yang ada.

Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang tepat dalam sebuah pengukuran kinerja, akan dapat pelaksanaan evaluasi kinerja yang akurat sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun

2018. Bappeda menggunakan indikator kinerja hasil Reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Padat tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor memiliki 4 sasaran dan 8 indikator yang ditetapkan yaitu:

#### **SASARAN :**

1. Meningkatkan sinergitas dan keberkelanjutan perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah

#### **INDIKATOR :**

1. Prosentase keselarasan antara renstra/renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD.
2. Persentase keselarasan antara perencanaan sektor( master plan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD.
3. Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target.
4. Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target.
5. Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD.
6. Persentase inovasi masyarakat diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota.
7. Penilaian AKIP Bappeda.
8. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi, dan atau Inspektorat Kota.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya berupa anggaran dan

Sumber Daya Manusia, maka sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2018 ditetapkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor tahun 2018. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sasaran-sasaran strategis untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2018, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.:

Selain beberapa capaian indikator kinerja tersebut,

masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain :

- Belum optimalnya tingkat aplikasi dokumen perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya tingkat aplikasi dokumen penelitian dan kajian yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- Belum optimalnya tingkat pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi;
- Persentase jumlah pegawai yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang setelah mengikuti diklat belum maksimal;
- Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencanaan; dan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal perlu dilakukan, diantaranya adalah :

- Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan dokumen perencanaan dan kajian sektoral kepada SKPD (*need assessment*);

- Mendorong kebijakan yang berpihak pada berkembangnya jabatan fungsional di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta memfasilitasi pejabat fungsional yang telah ada untuk mendapatkan kredit bagai peningkatan kinerja dalam jabatannya;
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan;
- Mengoptimalkan kegiatan diklat bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang perencanaan; dan
- Mengoptimalkan aplikasi SIMRAL pada seluruh SKPD pada lingkungan Pemerintah Kota Bogor.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Gambaran Umum Bappeda Kota Bogor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor merupakan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang memiliki kewenangan dalam (1) urusan perencanaan pembangunan, (2) urusan peataan ruang. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdapat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Mengingat nilai strategis yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor secara normatif di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor adalah “Lokomotif Pembangunan” daerahsertamenjadiliniterdapdalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor. Oleh karena itu perumusan kebijakan, pembuatan perencanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada proses dan hasil agar dapat memenuhi kepentingan publik, penyusunannya dilakukan secara partisipatif, professional dan bertanggung jawab sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Agar pelaksanaan pembangunan sejalan dengan orientasi yang diinginkan dan bersifat partisipatif terhadap perkembangan kompleksitas permasalahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2018



Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Rencana Pembangunan, Rencana Pembangunan Daerah harus menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasarkan asas rencana pembangunan daerah tersebut, maka penyusunan rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor selalunya menerapkan informasi dari hasil evaluasi kinerja perencanaan sebelumnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

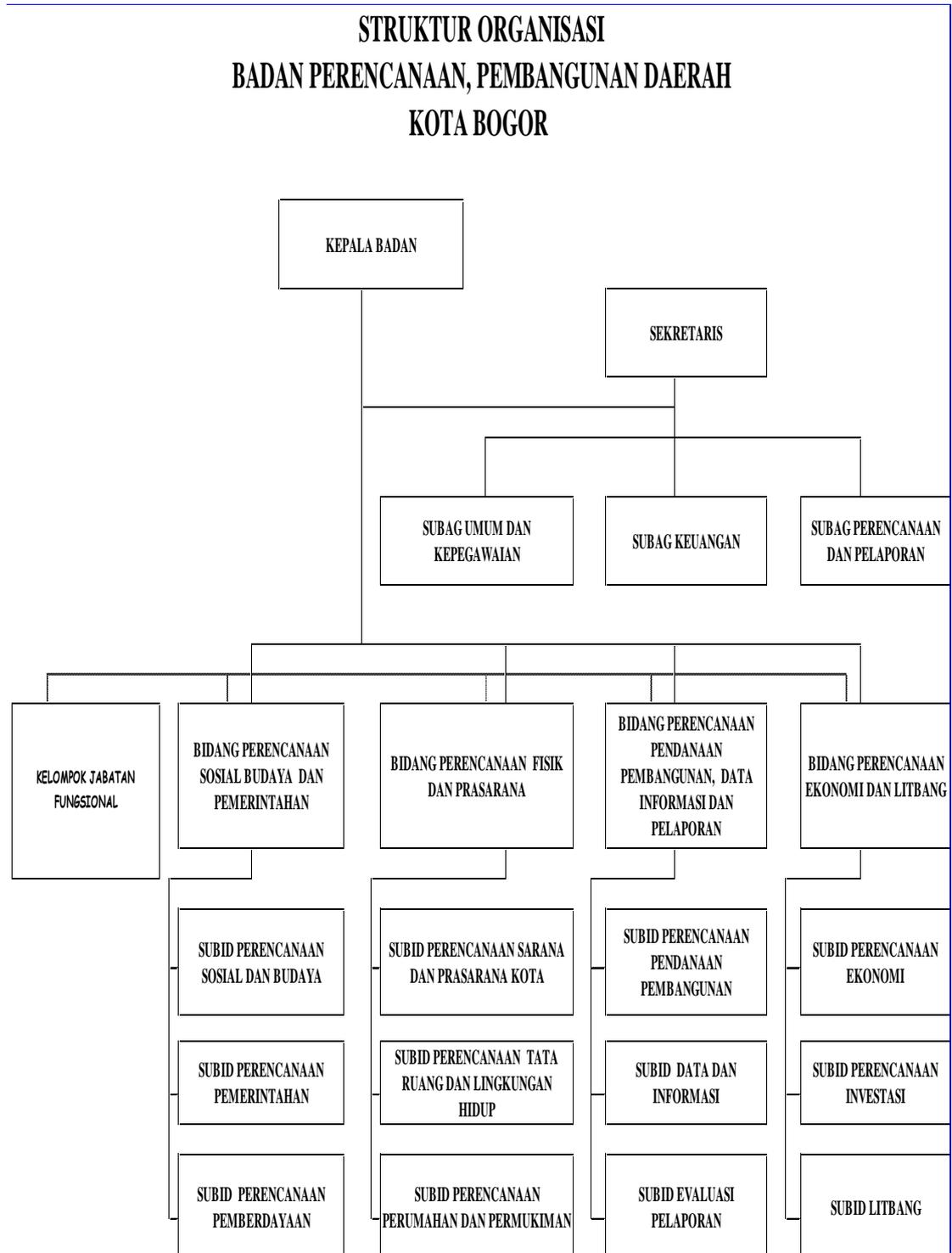
1. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
  - 2) Sub Bidang Perencanaan Saran dan Prasarana Kota
  - 3) Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman
3. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
  - 2) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan
  - 3) Sub Bidang Perencanaan Pemberdayaan
4. Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Data Informasi Dan Pelaporan membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan



- 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
  - 3) Sub Bidang Data Dan Informasi
5. Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
- 1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi
  - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - 3) Sub Bidang Perencanaan Investasi

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Bappeda Kota Bogor





**Sumber** : Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi, serta Tata kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

## B. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Bogor

### 1. Tugas Pokok Bappeda Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 82 Tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja jabatan structural di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor mempunyai tugas walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

### 2. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
2. Pelaksanaan tugas dukung teknis di bidang perencanaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukung teknis di bidang perencanaan;
5. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya :

- 1) Perencanaan pembangunan partisipatif, permasalahannya perencanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat masih belum optimal.
- 2) Perencanaan pembangunan yang holistik, terintegrasi dan mengarah pada konektivitas secara spesial serta berkelanjutan, permasalahannya a) Pembangunan daerah masih bersifat persial dan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor, b) Pembangunan daerah masih belum berkesinambungan.
- 3) Perencanaan pembangunan berbasis kinerja, permasalahannya pembangunan daerah masih belum seluruhnya berorientasi pada hasil output.

## D. Dasar Hukum

LKIP BappedaKotaBogorTahun 2018ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang; Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Bogor ( lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 nomor 1 seri D );
9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 78 Tahun 2015 tentang Capaian Sasaran Kinerja Tahunan dalam Lampiran VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019.
10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Keputusan Walikota Bogor no. 050.45.304 tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor:

## E. Sistematika Penulisan



Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun  
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata  
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berikut merupakan sistematika penulisan  
LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2018.

## **Bab I PENDAHULUAN**

Padabab ini diuraikan mengenai :

- a. Gambaran umum Bappeda Kota Bogor
- b. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Bogor
- c. Isu Strategis
- d. Dasar Hukum, serta
- e. Sistematika Penulisan.

## **Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Padabab ini diuraikan mengenai :

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Perjanjian Kinerja

## **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA:**

Padabab ini diuraikan mengenai :

- a. Pengukuran Kinerja
- b. Evaluasi, dan Capaian Kinerja
- c. Akuntabilitas Keuangan

## **Bab IV PENUTUP**

Padabab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah  
di  
masa mendatang yang akan dilakukan.



---

---

## BAB II

### PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

#### 2.1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan didepan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program / kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/ kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk:

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

#### A. VISI DAN MISI



**VISI** merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah:

**“ Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan secara partisipatif, profesional, dan bertanggung jawab ”**

Perencanaan Pembangunan yang **Berkelanjutan** artinya perencanaan pembangunan harus memihak kepada kelestarian dan keseimbangan lingkungan, peningkatan perekonomian masyarakat serta keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik termasuk keberpihakan pada kesetaraan gender. **Partisipatif** : pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus bersifat terbuka terhadap partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat. **Profesional** : semua input SDM Aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan. **Bertanggungjawab** : proses perencanaan pembangunan harus terukur baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga memudahkan dalam pengendalian.

**MISI** adalah penjabaran dari visi organisasi yang dituangkan dalam pernyataan (*statement*) organisasi yang terfokus kepada kebutuhan stakeholdernya. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.



Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Bogormempunyai misisebagai berikut:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akomodatif.
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

**Tujuan** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik.

**Sasaran** adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bogor Tahun 2015-2019 sebanyak 4 sasaran strategis. Berikut merupakan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran

**Tabel 2.1**

**Tujuan Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019**

Tujuan	Indikator tujuan	Target indikator tujuan
--------	------------------	-------------------------



Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Prosentase Keselarasan antara Program Pembangunan daerah dan RPJMD (jumlah indikator kinerja program pembangunan daerah yang menunjang sasaran RPJMD dibagi Jumlah seluruh indikator kinerja program pembangunan daerah X 100%)	100%
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap kinerja perencanaan pembangunan daerah	90%
Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja	Nilai AKIP BAPPEDA	A

Tabel 2.2

## Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran
Meningkatnya sinergitas dan berkelanjutan perencanaan pembangunan daerah	Prosentase keselarasan antara renstra/renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD	95%
	Persentase keselarasan antara perencanaan sektoral ( master plan/rencana induk/ rencana aksi ) dengan RPJMD/RKPD	95%
Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	95%



Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran
	Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	95%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	75%
	Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota	30%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Penilaian AKIP BAPPEDA	A
	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat propinsi, dan atau inspektorat kota	100%

### C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

**Strategi** adalah cara mencapai tujuandan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogora. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.



Pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi Internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bogor secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal.

Strategi yang ditetapkan Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang berbasis bukti dan data secara kualitas dan kuantitas yang sinergis dan berkelanjutan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel.

**Kebijakan** pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi. Untuk 2015-2019. Kebijakan yang ditetapkan adalah Teraplikasinya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. RPOGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM**

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka program yang akan dilaksanakan Inspektorat pada Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Program dan Indikator Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019**





No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah	Pengelolaan rumah tangga OPD	1.088.500.004
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Pengadaan inventaris kantor	1.135.000.000
			Pemeliharaan rutin berkala inventaris kantor	1.469.000.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	50.000.000
		jumlah temuan atas rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan pemeriksaan X 100%		
4	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP	Kegiatan Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) Perusahaan di Kota Bogor	150.000.000
		Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (Banprov 2018)	100.000.000
5	Program Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi	150.000.000



Daerah		Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	
		Kegiatan Penyempurnaan Kajian Teknokratik RPJMD	75.000.000
	Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Kegiatan Perencanaan Umum	800.000.000
	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	Kegiatan Penyusunan RKPD Tahun 2019	194.000.000
	Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	Kegiatan Pengkajian RKA SKPD T.A 2019 dan DPPA T.A 2018	300.000.000
	Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A 2019 serta Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan T.A 2018	400.000.000
	Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000
	persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	Kegiatan Penyusunan Kajian Hirarki Perencanaan	99.650.000
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	413.220.000



		Tingkat Kota		
		Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan	169.380.000
		Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang		
6	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)	100.000.000
		Persentase Data PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIMPATIK dan SIPD)	Kegiatan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan dan Statistik	100.000.000
		Jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana	245.900.000
7	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan	300.000.000
			Kegiatan Perencanaan Pembangunan Subid Sosial Budaya	202.245.000
			Pro Poor Planning	150.000.000



			and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (Banprov 2018)	
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup	100.000.000
			Kegiatan Review Masterplan Drainase (Lanjutan)	675.000.000
			Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota	250.000.000
9	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase konsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJMD	Kegiatan Penyusunan PERDA Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor	225.000.000
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Penelitian Pengembangan	150.000.000
			Kegiatan Penyusunan Rencana Ketenagakerjaan	50.000.000
			Kegiatan Kajian Ekonomi Penataan Surya Kencana	50.000.000
11	Program Penelitian Pengembangan	Jumlah Inovasi Masyarakat yang telah diinventarisir	Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) tahun 2018	500.000.000
		Persentase inovasi		



		masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota		
		Jumlah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas inovasi masyarakat		

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV. Perjanjian Kinerja Eselon II yaitu dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kota Bogor oleh Walikota Bogor. Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretaris dan Kepala Bidang oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2018**

**Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	1.	Persentase Keselarasan antara Renstra /Renja Bappeda dengan RPJMD/RKPD	persen	95
		2.	Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral (masterplan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD	Persesn	95
2	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	-	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Persesn	95
		-	Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Persesn	95
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	Persesn	75
			Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota	Persen	30
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	-	Nilai AKIP Bappeda	Nilai	A
		-	Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK , Inspektorat propinsi dan atau inspektorat kota	Persesn	100

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

**Tabel 3.1**  
**Predikat nilai capaian kinerja**

Capaian (%)	Kategori	Realisasi	Keterangan
85 - 100	Sangat Baik	> Target	Tercapai dan Melebihi Target
70 - <85	Baik	= Target	Tercapai
55 - <70	Cukup	< Target	Tidak Mencapai Target
<55	Kurang	> Target	

### 3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran pada Bappeda adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target Capaian dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target tahun 2018	Realisasi tahun 2018
1	2		3	4	5
1	Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase Keselarasan antara Renstra /Renja Bappeda dengan RPJMD/RKPD	95	67,43
		2	Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral (masterplan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD	95	95
2	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	95	66,67
		1	Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	95	95

3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	1	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	75	74,49
		2	Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota	30	333,33
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	1	Nilai AKIP Bappeda	83	-
		2	Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat provinsi dan atau inspektorat kota	100	100

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kerjasasaran, rincian sebagai berikut : Realisasi pada akhir tahun 2018 menunjukkan bahwa 4 ( empat ) Indikator kinerja sesuai yang ditargetkan dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran terdapat 4 ( empat ) indikator kinerja sasaran yang belum tercapai

**Tabel 3.3**

**Target Capaian dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2018	Capaian tahun 2018	%	Capaian tahun 2017	%	Kenaikan/ penurunan %
1	2	3	4	5				
1	Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan	1 Persentase Keselarasan antara Renstra /Renja Bappeda dengan	95	67,43	70,97	62,44	69,38	107,99%



	n daerah		RPJMD/RKPD						
		2	Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral (masterplan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD	95	95	100	93	100	102,15%
2	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	-	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	95	66,67	70,17	62,5	67,20	106,67%
		-	Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	95	95	100	93	100	102,15%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	75	74,49	99,32	70	100	106,41%
			Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota	30	100	333,33	-	-	100%

4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	-	Nilai AKIP Bappeda	83	-	-	72,89	88.89	-
		-	Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,Inspektorat propinsi dan atau inspektorat kota	100	100	100	100	100	100

### 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **Sasaran 1: Meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah**

Sasaran 1 meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah merupakan sasaran penting dengan indikator kinerja sasaran Persentase Keselarasan antara Renstra/Renja PD dengan RPJMD/RKPD dengan cara membandingkan capaian target perencanaan kinerja Perangkat Daerah tahun 2018 sebesar 21,01 dengan target penilaian KemenpanRb sebesar 30, Sedangkan indikator kinerja sasaran Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral (masterplan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD indikator tersebut merupakan

Indikator Kinerja Utama yang pelaksanaan setiap tahapan proses harus mempertajam indikator kinerja Perangkat Daerah, Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada pemerintah Kota Bogor. Koordinasi dan kolaborasi antar perencanaan sektor (master plan) rencana induk/rencana aksi dengan RPJMD/RKPD mencapai 100% sehingga ada sinkronisasi perencanaan yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah dengan pusat, Indikator kinerja sasaran tersebut diatas merupakan indikator yang sangat penting, relevan, dan cukup untuk mengukur terhadap sasaran 1.

**Tabel 3.4****Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1****Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target tahun 2018</b>	<b>Capaian tahun 2018</b>	<b>%</b>	<b>Capaian tahun 2017</b>
1	2	3	4	5		
1	Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	1 . Persentase Keselarasan antara Renstra /Renja Perangkat Daerah dengan RPJMD/RKPD	95	70,03	73,72	62,44
		2 . Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral	95	95	100	93



		(masterplan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD				
--	--	---	--	--	--	--

## **Sasaran 2: Meningkatkan capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah**

Sasaran ke 2 Meningkatkan capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan indikator (Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target dan Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target ).Indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator sasaran RPJMD secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap realisasi capaian kinerja pembangunan daerah terdapat peningkatan dari 51 indikator kinerja sasaran dalam RPJMD yang mencapai targetnya 34 indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD terdapat 443 indikator kinerja program dan yang mencapai target hanya 309 indikator kinerja program sedangkan 134 indikator kinerja program tidak mencapai target, target kinerja sasaran dan program telah tertuang dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Indikator sasaran tersebut diatas merupakan indikator yang sangat penting, relevan, dan cukup untuk mengukur terhadap sasaran 2

**Tabel 3.5**

### **Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2**

#### **Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah**



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2018	Capaian tahun 2018	%	Capaian tahun 2017
1	2	3	4	5		
2	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	- Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	95	66,67	70.17	62,5
		- Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	95	67,75	100	93

### **Sasaran 3 :Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah**

Sasaran ke 3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dengan indikator (Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD dan Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota).

maka aspirasi masyarakat melalui kegiatan musrenbang wajib diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor. Musrenbang merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun

anggaran yang berjalan sesuai dengan tingkatannya. Tujuan diadakannya Musrenbang yaitu untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya serta menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda Kota Bogor, maka aspirasi masyarakat yang diakomodir pada tahap perencanaan pembangunan dihitung menggunakan indikator Tingkat aspirasi (usulan) masyarakat yang terakomodir dalam dokumen penganggaran, adapun jumlah usulan hasil musrenbang tingkat kelurahan sebanyak 882 kegiatan sedangkan yang terakomodir hanya 657 kegiatan yang terdiri dari 238 kegiatan diakomodir di kegiatan kelurahan dan kecamatan, 419 kegiatan diakomodir di kegiatan Perangkat Daerah.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dengan upaya meningkatkan inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi Kota Bogor diperlukan dukungan dari pemerintah kota, dari jumlah inovasi 247 yang ada di Kota Bogor terdapat 44 inovasi berasal dari masyarakat dan 128 inovasi dari Perangkat Daerah yang memenuhi syarat dalam penunjang pembangunan yang mendukung visi misi kota Bogor, hasil capaian inovasi yng menunjang visi misi walikota Bogor.

**Tabel 3.6**

**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 :Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah**



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2018	Capaian tahun 2018	%	Capaian tahun 2017
1	2	3	4	5		
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	75	74,49	99,32	70
		Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota	30	100	333,33	-

#### **Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah**

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. pelaksanaan evaluasi kinerja berpedoman pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil ( outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) komponen penilaian **LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 201810**

diantaranya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Hasil pemerisaan tahun 2018 Badan Periksaan Keuangan tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Jawa Barat ada satu rekomendasi yaitu kegiatan Sinergitas perencanaan pengelolaan CSR( Banprop 2018 ) dan sudah ditindaklanjuti, sedangkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor ada 37 rekomendasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di Bappeda dan semuanya sudah ditindaklanjuti,

**Tabel 3.7**

**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 :Meningkatnyaakuntabilitas  
kinerja perencanaan pembangunan daerah**

<b>N o</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Target tahun 2018</b>	<b>Capaian tahun 2018</b>	<b>%</b>	<b>Capaian tahun 2017</b>
1	2	3		4	5		
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	-	Nilai AKIP Bappeda	83	-	-	72,89
		-	Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,Inspektorat propinsi dan atau inspektorat kota	100	100	100	100

## AKUNTABILITAS KEUANGAN



Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kota Bogor dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Pagu belanja langsung Bappeda Kota Bogor Tahun 2018 adalah sebesar Rp20.602.074.801(Dua puluh milyar enam ratus dua juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus satu ribu rupiah ) realisasi sebesar Rp . 18.152.090.171(Delapan belas milyar seratus lima puluh dua juta sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Bappeda Kota Bogorpada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**

**Tabel Anggaran dan Realisasi Kegiatan  
Bappeda Kota Bogor Tahun Anggaran 2018**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI KEGIATAN</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Belanja Tidak Langsung	10.760.179.797	9.488.619.650	88.18
2	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	1.088.500.004	929.840.525	85.42
3	Pengadaan Inventaris Kantor	1.135.000.000	1.063.272.000	93.68
4	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	1.469.000.000	1.307.723.300	89.02
5	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	50.000.000	42.788.341	85.58



6	Penguatan SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	500.000.000	444.644.550	88.93
7	Kajian Ekonomi Penataan Surya Kencana	50,000,000	49.207.500	98.41
8	Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dan SIMPATIK	100.000.000	99.334.063	99.33
9	Review Masterplan Drainase (Lanjutan)	675.000.000	611.274.700	90.56
10	Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup	100.000.000	91.334.256	91.33
11	Penyelenggaraan Perencanaan Sarana Prasarana Kota	250.000.000	244.217.305	97.69
12	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) TA. 2018	413.220.000	406.911.129	98.47
13	Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan KUPA PPAS Perubahan TA. 2018	400.000.000	289.027.558	72.26
14	Penyusunan PERDA Revisi Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor	225.000.000	217.305.704	96.58
15	Penyusunan Kajian Hirarki Perencanaan	99.650.000	97.380.000	97.72
16	Penyempurnaan Kajian Teknokratik RPJMD	75.000.000	49.254.228	65.67
17	Penyusunan Rencana Ketenagakerjaan	50.000.000	49.235.000	98.47
18	Perencanaan Umum	800.000.000	773.593.844	96.70
19	Penyusunan RKPD Tahun 2019	194.000.000	180.686.166	93.14
20	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah ( Banprov 2018 )	150.000.000	69.118.710	46.08
21	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik	245.900.000	190.949.605	77.65



	dan Prasarana			
22	Pro Poor Planning dan Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) ( Banprov 2018 )	150.000.000	95.582.400	63.72
23	Perencanaan dan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Litbang	150.000.000	135.639.125	90.43
24	Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR ) Perusahaan di Kota Bogor	150.000.000	117.964.239	78.64
25	Perencanaan pembangunan Subid Sosial Budaya	202.245.000	190.407.982	94.15
26	Perencanaan pembangunan Subid Pemerintahan	169.380.000	168.967.992	99.76
27	Perencanaan pembangunan Subid Pemberdayaan	300.000.000	272.717.016	90.91
28	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)	100.000.000	89.865.605	89.87
29	Pengkajian RKA SKPD Tahun 2019 dan DPPA SKPD TA 2018	300.000.000	180.171.500	60.06
30	Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR ( Banprov 2018 )	100.000.000	71.612.000	71.61
31	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	150.000.000	133.444.178	88.96
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.602.074.801</b>	<b>18.152.090.171</b>	<b>88.11</b>

Berdasarkan tabel Anggaran dan Realisasi APBD Bappeda Kota Bogor Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 bahwa capaian seluruhnya adalah 88.11 %



termasuk ke dalam kategori **BAIK** atau dana yang dianggarkan terserap sesuai dengan target.

## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor bulan Januari 2018 sampai dengan Desember Tahun 2018. LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2018 dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor menetapkan sebanyak 4(empat) sasaran dengan 8(delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh sasaran tersebut, secara umum telah tercapai sesuai target dan tercapai melebihi target. Dalam Tahun Anggaran 2018, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp20.602.074.801 ( Dua puluh milyar enam ratus dua juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus satu ribu rupiah ) realisasi sebesar Rp. 18.152.090.171 ( Delapan belas milyar seratus lima puluh dua juta sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor kepada pihak-  
LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2018



pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bogor.